



Tersisa 80 Hektare Kawasan Kumuh

■ Pemkot Yogya Lakukan Pendekatan Komunikatif Dalam Proses Penataan

YOGYA, TRIBUN - Penataan kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Yogyakarta. Selaras Surat Keputusan (SK) Wali Kota Yogyakarta No 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, ditetapkan 114,72 hektare kawasan kumuh di Kota Pelajar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Umi Akhsani mengatakan, seiring dengan program-program yang diterapkannya, sisa kawasan kumuh di Kota Yogya pun semakin menipis.

Ia menyebut, masih tersisa sekitar 80,94 hektare kawasan kumuh. Sebagian besar berada di sekitaran bantaran sungai. "Sampai akhir 2023 kami menangani 33,78 hektare kawasan, atau sekitar 29,45 persen dari total kawasan kumuh yang ditetapkan," jelasnya, tempo hari.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogya, Sugeng Purwanto menandakan, Pemkot punya deretan program terkait penanganan kawasan kumuh. Mulai dari Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) dan juga kolaborasi yang melibatkan Kota, Kampung, Kampus, Korporasi dan Komunitas (5K).

"Penataan kawasan permukiman, terutama kawasan kumuh ini, implementasinya luar biasa. Urusan penataan di lingkungan bukan sekadar masalah teknis, tapi lebih dari itu. Ada masalah psikologis, sosial, dan budaya yang perlu diperhatikan," tandasnya.

Dijelaskan, dalam mengembangkan konsep penataan wilayah kumuh, khususnya di bantaran sungai, pendekatan yang digunakan dirancang agar lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.

Konsep M3K, meskipun sederhana, perlu upaya kompleks untuk menerapkannya. "Penataan kawasan pinggir kali, yang sering melibatkan lahan Sultan

TERUS BERKURANG

- Berdasarkan SK Wali Kota Yogyakarta No 158 Tahun 2021, ditetapkan 114,72 hektare kawasan kumuh di Kota Pelajar.
- Seiring dengan program-program yang diterapkannya, kawasan kumuh di Kota Yogya terus berkurang dan tersisa sekitar 80,94 hektare.
- Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) jadi salah satu program andalan Pemkot Yogya dalam penanganan kawasan kumuh.
- Dalam mengembangkan konsep penataan wilayah kumuh, dilakukan pendekatan komunikatif dan mudah dipahami.

Ground, perlu sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor terkait, untuk mewujudkan kawasan tertata," urainya.

Berhasil ditangani

Sejauh ini, sebanyak 370 unit rumah milik warga di kawasan kumuh berhasil ditangani lewat program M3K. Program tersebut dilangsungkan di bantaran sungai, atau pinggir kali, di kawasan Sungai Winongo, Code, Gajehwong dan Manunggal.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya, Agus Tri Haryono menuturkan bahwa program tersebut digulirkan sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kawasan kumuh.

Namun, untuk kawasan kumuh yang terkendala pola pemugaran atau M3K, maka dilakukan penataan dengan metode lain yakni menggunakan konsep Perumahan dan Permukiman Layak Huni (Mahanami).

"Pemkot Yogya berupaya meningkatkan kualitas permukiman dengan segala potensi yang ada, baik dengan pemugaran dengan konsep M3K, maupun terobosan terbaru konsolidasi lahan dengan konsep Mahanami," tandasnya.

Salah satu lokasi yang disasar peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan konsep Mahanami adalah di Kelurahan Terban. Sebagai penyangga ekonomi wisata Malioboro, kawasan tersebut dibangun dengan konsep wisata riverside pedestrian.

Dengan lingkungan yang sudah tertata, Agus berha-

rap, potensi kawasan sungai akan lebih terlihatai dan menjadi etalase ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Upaya ini tentunya dilakukan untuk mencapai pengembangan penghidupan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPKP Kota Yogya, Sigit Setiawan mengungkapkan, penataan di Terban akan memundurkan rumah sejauh 4 hingga 10 meter dari tepi sungai, mencakup 19 rumah yang akan diatur ulang.

"Penataan di Terban cukup jauh, ada yang 4 meter sampai 10 meter. Kami juga akan membangun jalan inspeksi, ruang terbuka dengan tiga tingkat. Bahkan, dapat digunakan warga setempat untuk mengembangkan *foodcourt* di kawasan tersebut," tandasnya, Jumat (28/10).

Pembangunan rumah di kawasan tersebut sudah mencapai 65 persen, sementara pembangunan talud dan ruang terbuka hijau publik (RTHP) sekitar 50 persen. Pekerjaan ditarget selesai Desember 2024.

Dalam proyek ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga akan mendukung dengan penanaman tanaman di sepanjang talud sungai. "Jika talud sungai sudah selesai, ruang terbuka hijau akan segera menyusul. Dengan demikian, kawasan ini akan menjadi lebih layak huni," jelasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005